

**FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT
PENERAPAN APLIKASI E-KATALOG LOKAL DALAM
PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH OLEH LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK (LPSE) KOTA BONTANG**

Shania Lutfiah Nur Callista, Bambang Irawan

**eJournal Administrasi Publik
Volume 12, Nomor 3, 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Aplikasi e-Katalog Lokal dalam Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bontang.

Pengarang : Shania Lutfiah Nur Callista

NIM : 2002016032

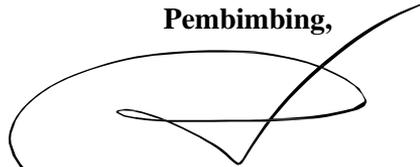
Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 18 Juli 2024

Pembimbing,



Prof. Dr. Bambang Irawan, M.Si

NIP 19760216 200501 1 002

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Program Studi Administrasi Publik  Dr. Fajar Apriani, M.Si. NIP 19830414 200501 2 003
Volume	: 12	
Nomor	: 3	
Tahun	: 2024	
Halaman	: 766-776	

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENERAPAN APLIKASI E-KATALOG LOKAL DALAM PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KOTA BONTANG

Shania Lutfiah Nur Callista ¹, Bambang Irawan ²

Abstrak

Prinsip dari pengadaan barang dan jasa yaitu efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga, salah satu bentuk penerapannya yaitu dengan metode e-Purchasing melalui e-Katalog lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan aplikasi e-Katalog lokal dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh LPSE Kota Bontang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah analisis model interaktif. Fokus penelitian ini yaitu faktor pendukung dan penghambat penerapan aplikasi e-Katalog lokal dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor pendukung penerapan aplikasi e-Katalog lokal dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kota Bontang yaitu dukungan penuh dari pemerintah, tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang handal dan memadai, serta adanya kesediaan dan partisipasi aktif dari penyedia barang dan jasa di Kota Bontang. Adapun faktor penghambat nya antara lain kurangnya LPSE dalam memberi edukasi terhadap beberapa penyedia yang masih melakukan kesalahan dalam menayangkan produknya, tidak semua barang dan jasa tersedia dalam e-Katalog lokal, dan masih kurangnya kemampuan SDM dari sisi penyedia dalam mengoperasikan sistem. Oleh karenanya, peneliti menyarankan kepada LPSE Kota Bontang untuk melaksanakan pendampingan yang lebih intens kepada penyedia, rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap etalase yang belum ada dengan kebutuhan para OPD guna mencukupi kebutuhan penyediaan etalase barang dan jasa, dan memberikan pelatihan rutin ataupun pemanggilan layanan secara langsung kepada pengguna atau penyedia barang dan jasa yang kurang mumpuni dalam mengoperasikan proses pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog lokal

Kata Kunci : *e-Purchasing, e-Katalog lokal, pengadaan barang dan jasa Pemerintah*

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: slnccallista@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Bagian penting dalam administrasi pemerintahan yaitu melakukan kegiatan pemenuhan barang dan jasa. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, perolehan barang/jasa pemerintah yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dimana siklusnya dimulai dari pemilihan prasyarat atau identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Syarat pengadaan barang dan jasa adalah dilakukan dengan efektif, efisien, dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga salah satu jenis pelaksanaannya adalah dilakukan secara elektronik dimana pengadaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku (Fadillah et al, 2022). Pada mulanya pengadaan barang dan jasa dilakukan secara konvensional. Dalam prosesnya, tidak jarang pihak tertentu menyalahgunakan pengadaan barang dan jasa untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Adanya fenomena yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara konvensional, mendasari pemerintah dalam membentuk perubahan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa, yang mengubah sistem pengadaan barang dan jasa menjadi berbasis elektronik melalui aplikasi e-Katalog dimana pelaksanaannya dikontrol langsung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Diterapkannya e-Katalog tersebut, maka keseluruhan lembaga pemerintah serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat melakukan pengadaan barang dan jasa tanpa sistem pelelangan. E-Katalog dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 mengenai Katalog Elektronik merupakan sistem informasi berbasis elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknik, jumlah ketersediaan barang dan jasa dari penyedia serta harga barang dan jasa. Dalam hal ini, e-Katalog lokal hanya akan menyediakan barang-barang yang berasal dari komoditas lokal saja. Namun, fitur yang disediakan sama dengan jenis lainnya.

Salah satu kota yang menerapkan e-Katalog lokal yaitu Kota Bontang yang mulai diimplementasi pada tahun 2022. Terhitung hingga Agustus 2023, jumlah produk yang tayang pada e-Katalog lokal Kota Bontang yaitu sejumlah 9,058 produk. Adapun klasifikasi UMKM yang dapat mendaftarkan produknya pada e-Katalog lokal Kota Bontang adalah UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan kualifikasi Usaha Mikro dan Kecil. Adapun barang dan jasa yang ada dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-Katalog lokal Kota Bontang adalah produk lokal dengan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri).

Adanya aplikasi e-Katalog lokal diharapkan dapat mempermudah dan mengefisiensi dalam pengadaan barang dan jasa serta dapat memberdayakan UMKM lokal yang ada namun, pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-Katalog lokal yang diterapkan oleh LPSE Kota Bontang sampai saat ini masih mengalami kendala dalam proses pelaksanaannya. Adapun kendalanya yaitu pemberlakuan maintenance rutin oleh LPSE Kota Bontang yang menjadi kebijakan preventif LPSE Kota Bontang yang diperuntukan agar kinerja software meningkat. Namun hal tersebut telah menghambat proses pengadaan akan menghentikan sistem dan menghentikan proses transaksi pengadaan barang dan jasa yang sedang atau akan berlangsung. Selain itu, masih terdapat kesenjangan digital padahal, hal tersebut menjadi kemampuan dasar agar dapat mengakses aplikasi digital, serta masih sering terjadi server down sehingga pengguna sering tidak bisa melakukan login akun dan menimbulkan ketidaknyamanan pada pengguna sebab pengadaan barang dan jasa juga akan diberhentikan sampai dengan waktu yang tidak pasti. Fenomena lainnya yaitu masih minimnya pemanfaatan e-Katalog lokal karena tidak semua barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah tersedia dalam etalase e-Katalog lokal Kota Bontang. Hal ini menjadikan pengadaan barang dan jasa masih diberlakukan secara manual atau dengan metode lainnya.

Adanya fenomena yang masih terjadi berbanding terbalik dengan tujuan dari adanya sistem e-Katalog lokal. Namun, melalui e-Katalog lokal diharapkan dapat menjadikan proses administrasi lebih singkat dan mempermudah pemerintah untuk memperoleh harga terbaik dari penyedia barang dan jasa, sebab pada sistem akan tercantum harga secara terbuka. Hanya saja, dalam penerapannya masih terdapat kesenjangan pada efisiensi waktu, dan SDM pengguna.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana faktor pendukung dan penghambat penerapan e-Katalog lokal dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh LPSE Kota Bontang. Melalui analisis ini, diharapkan dapat mengetahui lebih mendalam terkait faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan e-Katalog lokal sebagai media digital pengadaan barang dan jasa pemerintah Kota Bontang.

Kerangka Dasar Teori

Pelayanan Publik

Menurut Sellang (2019), pelayanan publik merupakan rangkaian proses atau manfaat yang dilakukan oleh suatu pihak yang sepenuhnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai hak masyarakat, sedangkan pelayanan bagi otoritas publik merupakan suatu bentuk komitmen yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai kemampuan fundamental dari otoritas publik itu sendiri. Artinya, pelayanan publik merupakan kegiatan yang melayani kepentingan publik atau masyarakat baik sebagai penerima layanan oleh aparat pemerintah sebagai pemberi layanan.

E-Government

E-Government merupakan bentuk pemanfaatan teknologi guna meningkatkan akses dan juga pemberian layanan dari pemerintah kepada warga negara, mitra bisnis dan karyawan yang dapat memberi manfaat (Wismayanti, 2022). Sedangkan menurut Tamara (2023), *E-Government* merupakan cara kerja aparatur pemerintah pusat dan daerah dalam memberi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dalam hal ini, *E-Government* adalah bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis internet yang dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien untuk memberikan manfaat kepada penerima layanan.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Menurut Francesco (2022) pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memenuhi barang dan jasa yang diperlukan dengan biaya yang wajar. Adapun sistem pengadaan yang baik akan menghasilkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam penggunaannya. Hal ini berarti, pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan memenuhi kebutuhan barang dan jasa dengan harga wajar yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementrian, Lembaga, Satuan kerja perangkat daerah, dan institusi yang membutuhkan, dimana prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan guna memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan.

E- Katalog

E-Katalog adalah sistem informasi berbasis elektronik yang memuat daftar barang dan jasa, merek, jenis, spesifikasi, jumlah ketersediaan, serta harga barang dan jasa yang disediakan oleh penyedia yang berguna untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah (Nafi'ah, 2022). Dalam hal ini e-Katalog merupakan sistem yang memuat seluruh informasi terkait barang dan jasa pemerintah yang di dalamnya terdapat daftar merk, jenis, harga, spesifikasi teknis. E-Katalog sendiri terbagi atas tiga jenis yaitu e-Katalog nasional yang disusun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa pemerintah, kemudian e-Katalog sektoral yang disusun dan dikelola oleh kementerian, dan e-Katalog lokal yang disusun dan dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Definisi Konseptual

Berdasarkan teori- teori yang telah diuraikan di atas, maka didapat definisi konseptual dari penelitian ini yaitu: Faktor Pendukung dan Penghambat penerapan aplikasi e-Katalog lokal dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kondisi yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat pencapaian tujuan dari penerapan sistem informasi berbasis elektronik yang menyediakan barang dan jasa dari komoditas lokal yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Nantinya akan didapatkan pemahaman mendalam mengenai masalah-masalah yang terjadi dalam penerapan e-Katalog lokal. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu faktor pendukung dan penghambat penerapan aplikasi e-Katalog lokal dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh LPSE Kota Bontang. Terdapat dua sumber dan jenis data yang digunakan yaitu data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan key informan di LPSE Kota Bontang yaitu Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kota Bontang, dan Jabatan Fungsional pengelola barang dan jasa serta informan lainnya yaitu penyedia barang dan jasa serta OPD yaitu pengelola pengadaan barang dan jasa ahli pertama Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian Kota Bontang. Serta data sekunder yang berasal dari penelitian yang dipublikasi mengenai penerapan aplikasi e-Katalog lokal dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Serta teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Napir (2019) dimana penerapan tekniknya terdapat komponen analisis data yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam era disrupsi 4.0, pemerintah telah mengundang sektor swasta dan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengembangan melalui *e-Purchasing*. *E-Purchasing* yang diimplementasi melalui e-Katalog merupakan langkah maju pemanfaatan teknologi dalam pengadaan barang dan jasa. Untuk memberi penguat dari sisi regulasi penerapan pengadaan barang dan jasa melalui *e-Purchasing* maka diturunkanlah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui *E-Purchasing*. Sistem ini menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam mencegah korupsi. Selain itu, adanya metode ini dianggap dapat mempercepat proses pengadaan barang/jasa tanpa mengesampingkan transparansi dan akuntabilitas publik. Namun segala bentuk sistem dengan berbasis elektronik memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya, salah satunya dalam pelaksanaan e-Katalog lokal oleh LPSE Kota Bontang yang akan diuraikan sebagai berikut :

Faktor Pendukung Penerapan Aplikasi e-Katalog Lokal dalam Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bontang

Faktor pendukung yang memengaruhi penerapan Aplikasi e-Katalog Lokal dalam Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bontang berdasarkan hasil penelitian antara lain :

1. Adanya Dukungan Dari Pemerintah

Organisasi dapat berjalan dengan adanya faktor pendorong seperti dukungan berupa anggaran, jika terjadi sebaliknya seperti kurangnya dukungan pendanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan *E-Government* maka hal tersebut bisa menjadi salah satu alasan kegagalan implementasi pelayanan publik secara *online* (Indrawan et al., 2022), dengan adanya penganggaran tentu akan seimbang dengan peningkatan kemampuan SDM maupun pengadaan fisik (Gea et al., 2023). Pemerintah Kota Bontang telah memberikan dukungan kepada LPSE Kota Bontang untuk dapat mendukung penerapan e-Katalog lokal. Terlebih penerapan yang berbasis teknologi harus dibarengi dengan kemampuan SDM pemakainya. Dalam hal ini pemerintah Kota Bontang telah memberikan alokasi anggaran kepada UKPBJ Kota Bontang yang digunakan LPSE untuk melaksanakan bimtek bagi pegawai dan sosialisasi bagi OPD dan penyedia dengan tujuan memberi pemahaman mendalam terkait penggunaan e-Katalog lokal. Pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan memungkinkan tercapainya tujuan penggunaan e-Katalog lokal di Kota Bontang.

Pelaksanaan e-Katalog lokal di Kota Bontang dinilai telah mendapat dukungan penuh dari pemerintah kota. Hal ini dilihat melalui pemanfaatan anggaran pemerintah melalui pelaksanaan sosialisasi yang akan seiring dengan peningkatan kemampuan SDM pengguna e-Katalog lokal. Tidak hanya itu, anggaran yang ada telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana penunjang pelaksanaan e-Katalog lokal. Hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan biaya yang telah diberikan pemerintah sebagai bentuk dukungan pemerintah Kota Bontang, menjadi faktor penting yang telah mendukung penerapan e-Katalog yang memerlukan SDM mumpuni dan kelengkapan sarana prasarana penunjang penerapan e-Katalog lokal.

2. Infrastruktur Yang Telah Memadai

Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang handal dan memadai di kantor UKPBJ, menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan e-Katalog lokal di Kota Bontang. Tersedianya sarana prasarana di UKPBJ Kota Bontang seperti komputer bagi setiap pegawai, ruangan-ruangan khusus seperti salah satunya *bidding room* sebagai ruang pelayanan khusus untuk proses pengadaan barang dan jasa melalui *online*, serta jaringan internet yang memadai menjadi pendukung penerapan e-Katalog lokal agar lebih efektif dan efisien. Berikut merupakan prasarana yang ada di LPSE Kota Bontang :

Gambar 1 Bidding Room



Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2024

Gambar 2 Ruang Pelayanan



Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2024

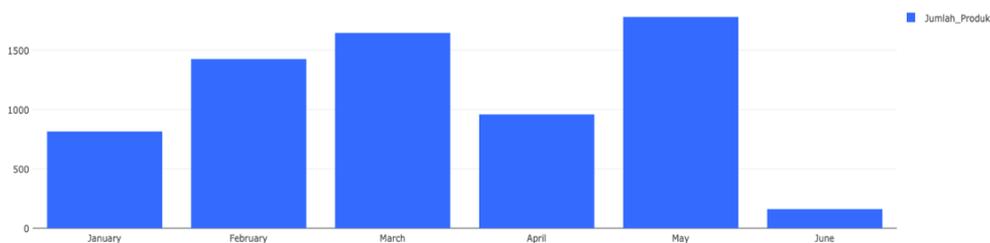
Perubahan teknologi yang akan terus terjadi, menjadikan komitmen UKPBJ untuk terus meningkatkan dan memperbarui etalase e-Katalog lokal karena penting untuk terus menjaga relevansinya. UKPBJ juga telah memiliki rencana kedepan terhadap peningkatan penggunaan e-Katalog lokal Kota Bontang yang dalam hal ini menjadi bentuk komitmen UKPBJ dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan e-Katalog seperti rencana pembuatan integrasi antar ruang di LPSE dengan ruang lainnya yang ada di UKPBJ, serta penambahan etalase e-Katalog lokal Kota Bontang sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan OPD. Melihat infrastruktur menjadi bagian penting dalam pelaksanaan e-Katalog lokal, sehingga terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana di LPSE Kota Bontang saat ini, menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui metode e-Katalog lokal.

3. Adanya Partisipasi Aktif Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah

Mengacu pada misi e-Katalog lokal yaitu memberdayakan UMKM lokal maka kesediaan dan partisipasi aktif dari penyedia barang dan jasa di Kota Bontang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan e-Katalog lokal karena partisipasi ini mendukung kesuksesan tujuan e-Katalog lokal Kota Bontang. Pada tahun 2024, e-Katalog lokal Kota Bontang telah merangkul sasarannya yaitu

UMKM lokal dimana penyedia yang telah menayangkan produknya dengan rata-rata lebih dari 200.000 penayangan produk. Selain itu, dalam kurun waktu 6 bulan, e-Katalog lokal terus mengalami peningkatan jumlah produk. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya partisipasi aktif penyedia di e-Katalog lokal Kota Bontang. Adapun partisipasi penyedia dalam menayangkan produknya dapat dilihat pada grafik dibawah :

Gambar 3 Grafik Penambahan Jumlah Produk Bulanan Pada E-Katalog Lokal Kota Bontang Tahun 2024



Sumber : e-Katalog, 2024

Berdasarkan gambar grafik di atas dapat dilihat pada tahun 2024, terdapat penambahan jumlah produk setiap bulannya antara lain pada bulan Januari terdapat penambahan 815 produk, Februari 1.425 produk, Maret 1.645, April 958 produk, Mei 1.779 produk, dan pada awal bulan Juni terdapat penambahan produk sejumlah 161 produk telah tayang pada e-Katalog lokal Kota Bontang. Dalam hal ini, penerapan e-Katalog lokal dinilai telah berjalan atas adanya dukungan partisipasi aktif dari penyedia. Adanya partisipasi aktif ini kemudian mendorong para OPD untuk melakukan pengadaan barang dan jasa melalui metode e-Katalog lokal karena tersedianya berbagai macam produk barang dan jasa sehingga partisipasi aktif penyedia menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan e-Katalog lokal oleh LPSE Kota Bontang.

Faktor Penghambat Penerapan Aplikasi e-Katalog Lokal dalam Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bontang

Faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan Aplikasi e-Katalog Lokal dalam Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bontang berdasarkan hasil penelitian antara lain :

1. Kurangnya Edukasi Terhadap Pengguna e-Katalog Lokal Kota Bontang

Untuk dapat mengoperasional sistem berbasis digital maka diperlukan pengetahuan mumpuni bagi pengguna yang menjalankan proses pengadaan barang dan jasa dengan berbasis *online*. Penerapan e-Katalog lokal di Kota Bontang masih didapati kurangnya pemahaman pengguna e-Katalog lokal

terutama bagi penyedia barang dan jasa, hal ini dilihat ketika masih banyaknya penyedia yang menayangkan produknya tidak sesuai pada etalase yang tersedia.

Berdasarkan rekapitulasi data kesalahan atau ketidaksesuaian kategori/Sub-Kategori Pada E-Katalog lokal Kota Bontang terdapat sejumlah 87 produk yang telah diturunkan tayangan pada 3 bulan pertama tahun 2024. Hal ini menjadi penghambat proses pengadaan sebab para OPD yang nantinya akan melakukan pengadaan akan mengulang prosesnya jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya seperti melakukan pengadaan barang pada produk yang tidak sesuai dengan etalasenya. Hal tersebut masih sering terjadi sebab masih kurangnya edukasi terhadap pengguna yang berakibat pada terbatasnya pemahaman penggunaan e-Katalog lokal sehingga penerapan pengadaan barang dan jasa Kota Bontang melalui sistem e-Katalog lokal seringkali terhambat.

2. *Terbatasnya Ketersediaan Etalase e-Katalog Lokal Kota Bontang*

Penerapan e-Katalog lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kota Bontang terhambat dalam hal kurangnya etalase yang tersedia untuk proses pengadaan. Saat ini LPSE Kota Bontang sedang dalam proses melengkapi etalase berdasarkan kebutuhan OPD. Namun, keterbatasan etalase yang ada menjadikan e-Katalog lokal tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan dalam pengadaan yang kemudian memaksakan OPD untuk mengambil metode selain dari *e-Purchasing*.

Adanya penghambat tersebut menjadikan pelaksanaan pengadaan melalui e-Katalog lokal Kota Bontang belum maksimal sebab tidak semua barang/jasa tersedia pada laman e-Katalog lokal karena minimnya etalase yang ada. Hal ini tidak hanya berdampak pada penyedia yang tidak bisa menayangkan semua produknya, tetapi juga berdampak pada OPD yang akan melakukan pengadaan tetapi kebutuhannya tidak tersedia di e-Katalog lokal sehingga, hal tersebut menjadi penghambat penggunaan e-Katalog lokal dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Bontang.

3. *Kurangnya Pemahaman Pengguna E-Katalog Lokal*

Penerapan sistem berbasis digital tentu harus dibarengi dengan kemampuan Sumber Daya Manusia sebagai penggunanya. Adanya perkembangan teknologi dan informasi mengharuskan para pengguna baik pegawai UKPBJ, LPSE, OPD, maupun penyedia, memiliki keterampilan dalam mengoperasikan sistem. Dalam penerapan e-Katalog lokal di Kota Bontang, SDM pengguna menjadi faktor penghambat penerapan e-Katalog lokal sebab tertera pada rekap pelayanan LPSE Kota Bontang terhitung sejak Mei sampai dengan Juli tahun 2024 keperluan pelayanan yang paling banyak dibutuhkan yaitu konsultasi terhadap kendala e-Katalog. Hal ini menjadi indikasi bahwa masih banyaknya pengguna yang mengalami kendala teknis pada penggunaan e-Katalog lokal.

Keterbatasan kemampuan ini menjadi faktor penghambat sebab kemampuan dalam mengoperasikan sistem berbasis *online* adalah hal yang wajib ketika menerapkan e-Katalog lokal dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Bontang. Suatu sistem tidak bisa bergerak jika SDM nya tidak bisa

mengoperasikan sistem tersebut. Meski dari pihak LPSE telah mengadakan sosialisasi namun berdasarkan data rekap pelayanan bahwa adanya keterbatasan pemahaman menjadi kendala hingga saat ini.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan dari faktor pendukung penerapan aplikasi e-Katalog lokal dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa oleh LPSE Kota Bontang yaitu dukungan penuh dari pemerintah dalam menerapkan e-Katalog lokal, tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang handal dan memadai, serta adanya kesediaan dan partisipasi aktif dari penyedia barang dan jasa di Kota Bontang, sehingga penerapan e-Katalog lokal di Kota Bontang dikatakan cukup baik. Namun disamping adanya faktor pendukung penerapan e-Katalog lokal Kota Bontang, terdapat pula faktor penghambatnya, antara lain kurangnya LPSE dalam memberi edukasi terhadap beberapa penyedia yang masih melakukan kesalahan dalam menayangkan produknya, tidak semua barang dan jasa tersedia dalam e-Katalog lokal, dan masih kurangnya kemampuan SDM dari sisi penyedia dalam mengoperasikan sistem.

Saran

Sesuai dengan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat diberikan beberapa saran antara lain :

1. LPSE melaksanakan sosialisasi yang lebih intens dengan memberikan edukasi mengenai penggunaan e-Katalog lokal secara khusus kepada penyedia yang masih melakukan kesalahan dalam menayangkan produknya di etalase e-Katalog lokal, mengadakan pelatihan dan pendampingan secara langsung agar tidak berbekal materi saja namun juga keterampilan bagi para penyedia di e-Katalog lokal Kota Bontang.
2. LPSE seharusnya rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap etalase yang belum ada dengan kebutuhan para OPD guna mencukupi kebutuhan penyediaan etalase barang dan jasa dan dapat memaksimalkan serta memberi efektivitas terhadap penggunaan e-Katalog lokal.
3. LPSE memberikan pelatihan rutin ataupun pemanggilan layanan secara langsung kepada pengguna penyedia barang dan jasa yang kurang mumpuni dalam mengoperasikan proses pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog lokal.

Daftar Pustaka

Fadillah, et al. (2022). Analisis Pelaksanaan Pembelian Kendaraan Dinas Melalui E-Katalog di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera

- Selatan. *Jurnal Dinamika Manajemen dan Kebijakan Publik*. 2(2). 19-24.
Diunduh dari : <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/dinamikamanajemen>
- Francesco, I. M., & Hastuti, H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Survei pada Pejabat Pengadaan di Kota Cimahi). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 237–243.
Diunduh dari: <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4126>
- Gea, Mesra. R.M., et al (2023). Analisis Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Maluku. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 10(1), 121–126. Diunduh dari: <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3732>.
- Indrawan, Febri Yuliani, Harapan Tua. (2022). Implementasi Elektronik Government (E-Gov) dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kecamatan Dumai Kota. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 4771–4777. Diunduh dari : <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9023>
- Nafi'ah. A. (2022). Analisis Stakeholder Kebijakan E-Katalog Lokal dalam Membranding Produk Lokal. *Public Sphere Review*, 1(2), 15–21. Diunduh dari: <https://doi.org/10.30649/psr.v1i2.32>.
- Napir, Suaib., Dikson, J. (2019). Penguatan Program Prioritas Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Gorontalo. *Journal of Public Administration and Government*, 1(1), 34–38. Diunduh dari: <https://doi.org/10.22487/jpag.v1i1.15>.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Sellang, Kamaruddin, et al. 2019. *Strategi dalam Peningkatan Kualitas pelayanan Publik (Dimensi, Konsep, Indikator, dan Implementasinya)*. Purworejo: Qiara Madia Partner.
- Tamara, Gea., & Agus, Widiyarta. (2023). Penerapan E-Government dalam Pelayanan Perizinan Online melalui “SIMPONIE” di DPMPTSP Kabupaten Serang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 5(1), 23–27. Diunduh dari: <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.571>.
- Wismayanti, Kadek. W. D., & Putu, Eka, P. (2022). Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Di Masa Era New Normal Pada Pemerintah Daerah Badung. *Jurnal media Bina*, 16(10), 7507–7518. Diunduh dari: <https://doi.org/10.33578/mbi.v16i10.1>.